

Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat

Dian Lofiatni¹

¹ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Al-Ghifari Bandung.

ARTICLE INFO

Article history:

Received Agustus, 2025

Revised Agustus, 2025

Accepted Agustus, 2025

Available online Agustus, 2025

dlofi3jhn@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan suatu situasi atau kejadian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum sudah berjalan dengan baik, hanya saja masih ditemukan kendala sering terjadinya kesulitan dalam pertukaran file ataupun import-eksport data, sering tidak keluar tampilan report yang diinginkan user, tanggal dan kode rekening sering tidak muncul dalam laporan, dan sering terjadi perbedaan jumlah hasil rekapan antar laporan yang tentu saja dapat berakibat pada keterandalan laporan. Meskipun demikian, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sudah mengupayakan melakukan pelatihan dan menyiapkan pegawai yang kompeten dalam pelaksanaan SIPD tersebut, menerapkan aturan-aturan yang tegas, melengkapi fasilitas pendukung, pengertian dan pemahaman bersama antar pegawai dan publik, dan mengadakan penyuluhan bagi pegawai di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Jawa Barat.

Kata Kunci: Efektivitas, Sistem Informasi, Dinas Sumber Daya Mineral, Jawa Barat

ABSTRACT

This study focuses on the effectiveness of the implementation of the Local Government Information System (SIPD) in the West Java Provincial Mineral Resources Office. This study employs a qualitative descriptive method to describe a situation or event. The results indicate that, overall, the system is functioning well; however, challenges persist, such as frequent difficulties in file exchange or data import/export, reports often failing to display the desired output, dates and account codes frequently missing from reports, and discrepancies in the total figures between reports, which could undermine the reliability of the reports. Nevertheless, the West Java Provincial Energy and Mineral Resources Agency has made efforts to conduct training and prepare competent staff for the implementation of the SIPD, enforce strict regulations, provide supporting facilities, foster mutual understanding and cooperation among staff and the public, and conduct outreach programs for staff at the West Java Provincial Energy and Mineral Resources Agency.

Keywords: Effectiveness, Information System, Mineral Resources Agency, West Java

1. PENDAHULUAN

Kemampuan pegawai sebagai sumber daya manusia dalam suatu organisasi sangat penting arti dan keberadaannya bagi peningkatan produktifitas kerja di lingkungan organisasinya, tanpa

*Corresponding author

E-mail addresses: dlofi3jhn@gmail.com



ditunjang oleh sumber daya manusia yang berkualitas, dapat diperkirakan organisasi tersebut sulit untuk maju dan berkembang. Kemampuan pegawai akan nampak pada kinerjanya yang erat kaitannya dengan efektivitas.

Pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaksana otonomi daerah menanggung beban dan tanggung jawab yang berlebih, tentu mengandung konsekuensi logis yaitu beban anggaran, baik anggaran belanja maupun anggaran pendapatan, termasuk dalam kewenangan membuat kebijakan daerah untuk menghitung anggaran pendapatan dan belanja daerah. Namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala/hambatan yaitu, pertama faktor organisasi dan manajemen penyelenggaraan otonomi daerah, diantaranya dengan semakin banyaknya Dinas/kantor/lembaga baru yang dibentuk dengan jumlah jabatan struktural/fungsional bertambah banyak tapi miskin fungsi, sehingga terjadi duplikasi tugas dan fungsi antara Dinas/instansi/lembaga yang hampir mempunyai kemiripan antara satu dengan yang lain, semakin menjadi beban anggaran belanja daerah.

Pemberian motivasi menjadi salah satu fungsi strategis yang perlu dilaksanakan secara tepat untuk mendukung hal tersebut, sehingga setiap pegawai mempunyai kegairahan kerja dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya dan bersungguh-sungguh dalam meningkatkan efektivitas kerjanya guna mendapatkan hasil pekerjaan sesuai dengan harapan, peran motivasi menjadi sangat penting untuk menciptakan situasi kerja agar pegawai terdorong untuk berperilaku yang sesuai dengan tujuan berorganisasi. Dengan demikian apabila pegawai merasa adanya dorongan yang kuat karena adanya situasi kerja yang baik diharapkan semangat kerja pegawai meningkat, dengan meningkatnya semangat kerja pegawai untuk berprestasi maka efektivitas pegawai akan meningkat. Tentunya pemberian motivasi terhadap pegawai harus bersifat positif dan membangun.

Dalam rangka melaksanakan pertanggungjawaban keuangan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memanfaatkan teknologi informasi agar dapat mempermudah proses pengelolaan data keuangannya. Hal ini disebabkan oleh terjadinya peningkatan total volume Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun ke tahun. Peningkatan volume kuantitas transaksi tentunya harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah diatur dalam PP Nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah yang merupakan pengganti PP Nomor 11 Tahun 2001 tentang informasi keuangan daerah.

Salah satu inovasi kebijakan yang ditawarkan saat ini adalah kebijakan mengenai sistem informasi, dimana sistem informasi saat ini berkembang dengan pesat dan memiliki pengaruh yang besar sehingga makin dinilai tinggi dalam sebuah organisasi. Sehingga dibuatlah Permendagri No 90 Tahun 2019 merupakan ketentuan implementatif dari penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Permendagri No 90 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan / pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single codebase untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan sehingga dapat membangun database provinsi, kabupaten/kota yang dapat menggambarkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah dalam mendukung pengembangan sistem informasi pengelolaan database profil daerah yang valid dan akurat.

Namun ada faktor lain yang mendukung terciptanya sistem informasi yaitu adanya kelemahan dalam pemanfaatan data-data pembangunan. Hal itu didasari pula karena data-data pembangunan daerah tidak lengkap dan tersebar di masing-masing SKPD (Satuan Perangkat Kerja Daerah) serta tidak diperbaharui secara berkala, sehingga Instansi yang berfungsi sebagai unit pendukung pembangunan daerah dalam hal ini yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral



Provinsi Jawa Barat mengalami kendala dalam mengumpulkan data untuk kepentingan penyusunan perencanaan.

Departemen Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri tersebut telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri tersebut menjelaskan siklus keuangan daerah mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Selain itu juga disajikan sistem dan prosedur keuangan daerah beserta contoh-contoh formulir yang bisa digunakan oleh pemda baik secara manual maupun terkomputerisasi (*computerized*). Penyajian laporan keuangan dalam permendagri ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Berdasarkan hasil observasi, di indikasi bahwa belum optimalnya efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat ini didasarkan pada indikator-indikator sebagai berikut:

1. Belum optimalnya dimensi tujuan organisasi dalam penerapan SIPD sebagai contoh tentu harus adanya pembagian tugas yang jelas pula terhadap program-program kerja yang akan dilaksanakan oleh pegawai. Suatu organisasi atau instansi yang sudah memiliki efektivitas kerja yang baik, berarti organisasi atau instansi tersebut dapat menjalankan fungsinya dalam mengimpun, mengorganisir, dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan untuk organisasi serta kerjasama yang terarah, sehingga terciptanya efektivitas dan efisiensi kerja. Hal ini akan memudahkan organisasi atau instansi tersebut dalam mencapai tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya oleh organisasi atau instansi yang bersangkutan.
2. Belum optimalnya dimensi komposisi dan struktur organisasi sebagai contoh masih adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan aplikasi SIPD membuktikan bahwa organisasi belum berjalan dengan efektif.
3. Belum optimalnya dimensi teknologi organisasi, sebagai contoh masih ada seperti yang dikemukakan diawal bahwa pada dasarnya hadirnya SIPD adalah untuk menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan secara tepat waktu, lengkap akurat dan dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik pada umumnya dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dengan menyediakan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi pada khususnya namun masih belum sempurnanya aplikasi SIPD membuat petugas menjadi kebingungan dalam pelaksanaannya.

Maka dari itu dalam penelitian kali ini yang akan peneliti teliti adalah **“Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat”**.

2. METODE

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Secara harfiah, metode deskriptif merupakan metode penelitian untuk menggambarkan suatu situasi atau kejadian. Sugiyono (2017:12) mendefinisikan metode penelitian kualitatif adalah “metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat

Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat yang saat ini berlokasi di Jalan Soekarno Hatta No. 576 Bandung, pertama kali dibentuk pada Tahun 1978 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4/DP/040/DP1978 dan kelembagaannya diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5/DP/040/DP1978. Awalnya Dinas ini berdiri dengan nama “Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Jawa Barat”. Peraturan Daerah ini baru dapat dilakukan pada Tahun 1986 setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1986 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I. Salah satu faktor yang mendorong terbitnya Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1986 tersebut adalah kenyataan semakin meluasnya penambangan di daerah terutama untuk jenis bahan galian golongan C yang telah menyebabkan peningkatan intensitas kerusakan serta gangguan terhadap kemampuan dan fungsi lingkungan, sehingga peran Pemerintah Daerah perlu lebih dipertegas dalam pengaturan dan pengendaliannya, melalui penyerahan urusan.

Karena Peraturan Daerah yang ditetapkan pada Tahun 1978 tersebut dinilai sudah tidak sesuai lagi pada saat pengesahan PP Tersebut, maka pada Tahun 1988 dilakukan pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5/DP/040/DP1978 yang diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1988 Tentang Perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja, dengan susunan organisasi terdiri dari : 1 (Satu) Bagian Tata Usaha; 4 (Empat) Sub Dinas Yaitu Sub Dinas Konservasi, Sub Dinas Pengusahaan Pertambangan, Sub Dinas Bina Program, Sub Dinas Teknik Pertambangan serta ditambah dengan pembentukan 7 (Tujuh) cabang Dinas yang meliputi : cabang Dinas I/ Serang, cabang Dinas II/ Bogor, cabang Dinas III/ Sukabumi, cabang Dinas IV/Cirebon, cabang Dinas V/ Purwakarta, cabang Dinas VI/ Bandung, cabang Dinas VII/Tasikmalaya.

Pada Tahun 2000 Seiring Dengan Bergulirnya Otonomi Daerah dilakukan perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Dinas Pertambangan, dengan nama Dinasnya berubah menjadi “Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Barat” dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, yang meliputi : 1 (Satu) Bagian Tata Usaha; 5 (Lima) Sub Dinas yaitu Sub Dinas Bina Program, Sub Dinas Eksplorasi dan Pemetaan, Sub Dinas Bina Usaha, Sub Dinas Bina dan Sub Dinas Konservasi dan Pengendalian

Seiring dengan bergulirnya Otonomi Daerah dan meluasnya bidang pekerjaan serta mengikuti Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) pusat yaitu Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral maka pada Tahun 2009 dilakukan kembali perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Barat, dengan nama Dinasnya berubah menjadi “Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat” Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2009, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :

- Perumusan dan penetapan kebijakan teknis energi dan sumberdaya mineral;
- Penyelenggaraan urusan kesekretariatan, listrik dan pemanfaatan energi, mineral, geologi dan airtanah, panas bumi dan migas, serta bina usaha dan kerjasama;
- Penyelenggaraan fasilitasi urusan energi dan sumberdaya mineral meliputi listrik dan pemanfaatan energi, mineral, geologi dan airtanah, panas bumi dan migas serta bina usaha dan kerjasama;



- Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD.

PEMBAHASAN

Analisis Efektifitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat.

Peneliti akan menguraikan dan membahas Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dengan teori yang dijadikan pengukuran efektivitas organisasi peneliti gunakan menurut Richard M. Steer (dalam Irawati, 2013; 6-7), yakni meliputi Kejelasan Tujuan, Komposisi dan Struktur, Teknologi Organisasi dan Lingkungan Organisasi. Keempat alat ukur tersebut dapat digambarkan dalam pembahasan analisis Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

1. Kejelasan Tujuan

Tujuan sangat penting dirumuskan dengan jelas karena akan digunakan sebagai tolak ukur pembentukan organisasi. Tujuan tersebut dapat melahirkan berbagai macam fungsi dan fungsi-fungsi tersebut dapat memperkuat organisasi dan memberikan fokus bagi kegiatan- kegiatan organisasi untuk mencapai hasil-hasil yang dikehendaki secara baik.

Berdasarkan observasi dan wawancara bahwa tujuan dari penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini adalah untuk menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan secara tepat waktu, lengkap akurat dan dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik pada umumnya dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dengan menyediakan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi pada khususnya.

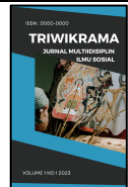
Ciri utama SIPD adalah sistem komputerisasi yang dirancang untuk membantu proses pengolahan data keuangan pada pemerintah daerah. Secara umum pegawai yang terkait dengan proses pengoperasian SIPD pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat telah mengerti dan paham tentang tujuan dan penerapan SIPD.

Hal ini terbukti dari wawancara dengan beberapa pegawai, yang mengatakan “Yang jelas SIPD itu sebuah aplikasi komputer untuk mengolah keuangan daerah” tambahnya, “Adanya SIPD membuat pengolahan keuangan Daerah lebih cepat dan lebih efisien tidak perlu diulang untuk pembuatan laporan keuangan, kita tinggal input lalu SIPD bekerja secara otomatis itu lebih memudahkan kita”. Selanjutnya pegawai tersebut juga mengungkapkan bahwa “Sebelum dilakukan penerapan, terlebih dahulu dilakukan kajian atau diklat khusus antara BPKP dan pengguna sistem yaitu kami sendiri. Kajian berisi mengenai manfaat atau tujuan penggunaan SIPD keuangan serta prosedur pelaksanaannya”.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas menunjukkan bahwa tujuan dalam penerapan SIPD sudah sesuai dengan tujuan dirancangnya system tersebut untuk membantu dan memudahkan pegawai dalam pelaksanaan laporan keuangan dan informasi keuangan secara tepat waktu, lengkap akurat dan dapat diandalkan.

2. Komposisi dan Struktur Organisasi

Komposisi menunjukkan adanya latar belakang (tingkat pendidikan, tingkat kemampuan intelektual, ciri-ciri kepribadian, dan motivasi) dari anggota organisasi atau kualifikasi yang diperhatikan sejalan dengan peranan, tugas, dan fungsi serta aktivitas pencapaian tujuan. Sedangkan struktur organisasi mengacu pada bagaimana organisasi mengatur dirinya, dengan membagi tugas dan peranan secara baik, penetapan uraian tugas secara lengkap serta jelas, dan



adanya pengaturan kewenangan oleh unsur pimpinan secara jelas, sehingga mampu menggambarkan kebutuhan untuk pencapaian tujuan organisasi.

Struktur organisasi yaitu sistem pengelompokan pekerjaan yang ditata dalam suatu struktur agar organisasi tersebut dapat digerakan secara maksimal dalam suatu jalinan kerja yang efektif dan efisien. Elemen yang diperhatikan dalam penelitian ini adalah bagaimana kesesuaian penempatan individu pada struktur yang ada dengan kualifikasi pendidikan yang dimilikinya, dan bagaimana pemanfaatan teknologi dalam organisasi tersebut. Dimensi faktor pengorganisasian struktur terdiri dari indikator-indikator yang mendukung membentuk ikatan dan hubungan baik tiap-tiap bagian dan sub bagian, koordinasi dari manajemen dapat dilihat pada pernyataan :

Berdasarkan gambaran yang diperoleh bahwa pegawai cenderung menjawab kurang sesuai terhadap pernyataan bahwa struktur organisasi yang baik haruslah dibarengi dengan koordinasi yang baik dalam proses kerja sama organisasi untuk efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan organisasi yang ada. Berdasarkan gambaran tersebut dapat dilihat bahwa koordinasi yang baik dalam proses kerja sama dalam organisasi untuk efektif dan efisien sudah sesuai dengan kondisi yang ada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat. Meskipun kondisi seperti sekarang ini masih banyak permasalahan yang dihadapi tentunya perlu diperbaiki oleh seluruh unsur agar tercapai organisasi yang efektif dan efisien dan koordinasi yang baik dalam kerja sama pegawai sesuai dengan harapan terutama dalam Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

3. Teknologi Organisasi

Pemanfaatan teknologi modern yang diimbangi dengan kompetensi penggunaannya oleh karyawan akan menciptakan daya dukung bagi percepatan pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan observasi dan wawancara diperoleh informasi bahwa SIPD secara umum menurut BPKP (2007;21) yaitu sebuah sistem komputerisasi yang dirancang untuk membantu proses pengolahan laporan keuangan pemerintah daerah dan Ungkapan hasil wawancara diatas juga membuktikan bahwa para pegawai merasa terbantu dengan adanya sistem ini dan bisa di nyatakan sistem ini efektif dalam penerapannya.

Pemahaman yang baik mengenai system aturan perilaku, norma, kriteria dan standar yang sedemikian rupa, sehingga pemahaman tersebut menumbuhkan pengertian yang mendalam atau kesadaran bahwa ketaatan akan aturan; norma; kriteria; dan standar tadi merupakan syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan (sukses) bersama, oleh karena itu kerjasama yang baik dengan berbagai elemen merupakan salah satu kunci keberhasilan efektivitas organisasi.

Berdasarkan observasi dan wawancara diketahui bahwa kerjasama pegawai dalam hal penerapa teknologi organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat bisa dinyatakan sudah optimal, indikasi tersebut dapat terlihat bahwa tingkat kesalahan dalam melakukan pekerjaan dapat diminimalisir dengan adanya kerjasama. Selain itu juga meskipun masih terdapatnya pegawai yang belum memahami tugas dan fungsinya dalam menjalankan pekerjaannya dengan masih adanya tumpang tindih dalam hal penyelesaian pekerjaan, kurangnya pemahaman tersebut dikarenakan masih belum sesuai latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh para pegawainya.

4. Lingkungan Organisasi

Lingkungan yang dimaksud merupakan kondisi lingkungan/suasana kerja di dalam organisasi yang berpengaruh terhadap produktivitas kerja dan hubungan yang harmonis bagi karyawan khususnya yang berkaitan dengan lingkungan fisik, seperti tingkat kebisingan, tata letak ruang kerja, penataan warna, dan penataan ruang dalam maupun luar ruangan. Lingkungan organisasi yang memadai akan mempengaruhi keefektifitasan organisasi.



Berdasarkan observasi dan wawancara bahwa Kuantitas Sistem Informasi dapat diukur dari banyaknya atau jumlahnya (Wikipedia Indonesia), analisis efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di lihat dari segi kuantitas terdiri dari hasil keluaran yang dihasilkan oleh SIPD pada bagian penganggaran diantaranya adalah RKA (Rencana Kerja Anggaran), DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran), dan Perbup/Perwal/Perda (Peraturan Bupati/Walikota/Gubernur). Berikut hasil wawancara untuk menggambarkan proses pelaksanaan kerja SIPD terkait proses penginputan data sampai dengan menghasilkan sebuah output adalah sebagai berikut: “RKA merupakan laporan yang memuat tentang rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dibuat sebagai dasar pembuatan DPA setelah disetujui oleh DPR”.

RKA tadi merupakan input yang menjadi dasar pembuatan DPA” Selanjutnya staf tersebut juga mengungkapkan bahwa : “Kalau RKA tadi berisi tentang rencana anggarannya, DPA ini memuat tentang dasar pelaksanaan anggaran untuk pendapatan, belanja dan pembiayaannya, selanjutnya DPA ini sebagai dasar untuk penerbitan Perbup/Perwal/Perda (Peraturan Bupati/Walikota/Gubernur) tentang penjabaran APBD yang akan dialokasikan, dan dengan adanya SIPD kami tidak perlu mengulang pembuatan laporan membuat kami lebih cepat dalam proses perealisasi anggaran ke masing-masing Dinas”. Tambahnya “Sejak adanya sistem ini diterapkan kami merasa sangat terbantu dalam penyusunan RKA dan DPA. Begitu pula dengan bagian-bagian lainnya, pekerjaan lebih mudah namun tetap memerlukan pengawasan. Output yang dihasilkan SIPD dapat dilihat di lampiran.

Berdasarkan observasi dan wawancara terkait lingkungan organisasi di atas menunjukan bahwa lingkungan kerja yang efektif ditunjang oleh kemampuan administratif pegawai, sebagai bentuk dari kemampuan sumber daya manusia merupakan unsur penentu dalam keberhasilan organisasi dalam produktivitas kerja. Sumber daya manusia dalam hal ini adalah pegawai, perlu terus dikembangkan baik dari segi pendidikan formalnya maupun pendidikan jenjang kariernya. Elemen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kondisi pegawai menurut jenjang pendidikan formal, dan keadaan pegawai berdasarkan jenjang pendidikan karier.

Kualitas informasi SIPD mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan seperti masyarakat, para wakil rakyat, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, dan pemerintah terbukti alur pembuatan RKA sendiri harus disetujui oleh Para Wakil Rakyat setelah disetujui baru membuat DPA dan diterbitkan peraturan pemerintah yang dapat dilihat oleh semua elemen pemerintah dan masyarakat.

Faktor-Faktor Penghambat Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat

Pelaksanaan Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi. Berbagai kendala yang dihadapi tersebut peneliti simpulkan dalam beberapa kategori, diantaranya berhubungan dengan:

1. Hambatan penerapan SIPD jika dilihat dari segi kelemahan dalam pengelolaan data keuangan antara lain sering terjadinya kesulitan dalam pertukaran file ataupun import-eksport data, sering tidak keluar/tampil laporan atau report yang diinginkan user, tanggal dan kode rekening dalam laporan sering tidak keluar/tampil dalam laporan tersebut, sering terjadi perbedaan jumlah hasil rekapan antar laporan yang tentu saja dapat berakibat pada keterandalan laporan.
2. Hambatan lainnya apabila terjadi kesalahan penginputan dalam laporan, user akan mengalami kesulitan melakukan perbaikan (*rollback*) karena disebabkan semua laporan berada dalam



satu database, jadi apabila satu laporan di rollback otomatis akan mempengaruhi laporan yang lainnya

3. Sistem pengoperasian pengelolaan data keuangan SIPD dinilai sangat rumit atau tidak user friendly yang tidak mengikuti perkembangan teknologi pemrograman yang sudah berfokus kepada kenyamanan penggunaan dari user.

Upaya Mengatasi Hambatan Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat.

Pelaksanaan Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi seperti halnya telah diuraikan sebelumnya, oleh karena itu perlunya upaya-upaya dalam hal menanggulanginya adapun upaya penaggulangannya yaitu:

1. Menyiapkan pegawai yang kompeten dalam pelaksanaan Efektivitas Organisasi dalam Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat mesti dilakukan peningkatan kapasitas keterampilan dan kemampuan pegawai dalam bidangnya. Program pelatihan tidak terbatas pada menciptakan pegawai yang cakap dalam melaksanakan tugas dibidangnya namun harus berorientasi pada perlengkapan dan kesiapan pegawai untuk mendapat adaptasi dengan perubahan yang harus terjadi.
2. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi lainnya (misalnya Bappeda, Bapenda, BPKAD, Real Estate Indonesia, dan lain-lain yang diperlukan) dimaksudkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pembentukan basis data SIPD.
3. Mengadakan Penyuluhan kepada masyarakat dan instansi lainnya mengenai maksud dan tujuan diadakannya kegiatan pembentukan basis data SIPD.

Menyadari akan kebutuhan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat tersebut maka dalam menciptakan suatu kinerja organisasi yang efektif dan efisien di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dalam memanfaatkan Teknologi Informasi, yaitu suatu sistem informasi yang diberi nama Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem ini dirancang-bangun sebagai total sistem yang mencakup segala aspek dalam pengelolaan administrasi dalam lingkup manajemen informasi, kemudian dapat juga untuk merancang suatu sistem kinerja yang handal dan terpadu sehingga dapat menciptakan suatu sistem manajemen yang efektif.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat pada umumnya sudah berjalan dengan baik meskipun masih ada beberapa aspek yang belum optimal berdasarkan dari hasil analisis terhadap kondisi dijumpai dalam penelitian SIPD memudahkan proses penyusunan laporan keuangan, pegawai tinggal mencatat/menginput data pada sistem. Selanjutnya proses pengklasifikasian, pengikhtisaran hingga akhirnya terbentuk laporan keuangan, dikerjakan secara otomatis oleh sistem. SIPD menyebabkan informasi yang dihasilkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat menjadi lebih baik dari segi ketepatan waktu. Kualitas informasi yang dihasilkan SIPD antara lain: a. Dapat di pahami b. Relevan c. Andal d. dan dapat diperbandingkan. Terintegrasi, dapat diimplementasikan untuk pengelolaan keuangan daerah, sebagai berikut: a) Pengendalian transaksi terjamin b) Sesuai dengan SAP. c) Mendukung terwujudnya *good governance* dan *clean government* dalam penyelenggaraan otonomi daerah.



Faktor-faktor penghambat Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat adalah sering terjadinya kesulitan dalam pertukaran file ataupun import-eksport data, sering tidak keluar/tampil laporan atau report yang diinginkan user, tanggal dan kode rekening dalam laporan sering tidak keluar/tampil dalam laporan tersebut, sering terjadi perbedaan jumlah hasil rekapan antar laporan yang tentu saja dapat berakibat pada keterandalan laporan.

Usaha-usaha yang telah dilakukan dalam menanggulangi hambatan Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat adalah dengan melakukan pelatihan dan menyiapkan pegawai yang kompeten dalam pelaksanaan SIPD tersebut, menerapkan aturan-aturan yang tegas, melengkapi fasilitas pendukung, pengertian dan pemahaman bersama antar pegawai dan publik, mengadakan penyuluhan/pelatihan bagi pegawai untuk menyadari perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.

Saran

1. Adanya penerapan teknologi informasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat diharapkan mampu mendorong kinerja aparatur pajak ke arah yang lebih baik, dilihat dengan adanya pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan, dan pembinaan.
2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat harus melakukan pembinaan sumber daya manusia yang baik dalam segi mental maupun kecakapannya dan keahliannya untuk mendukung penyelenggaraan penerapan teknologi informasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang baik.
3. Diperlukan upaya untuk membangun kultur birokrasi dan etos kerja untuk meningkatkan efektivitas organisasi menuju pelayanan prima dalam arti pelayanan yang cepat, tepat, pasti, efisien, transparan, akuntabel, menjamin rasa aman, nyaman, tertib bagi masyarakat. Dengan demikian, penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, mampu menciptakan kemudahan, kecepatan, serta ketepatan kegiatan administrasi serta meningkatkan kinerja aparatur. Selain itu, teknologi informasi yang canggih merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah yang juga dapat meningkatkan kinerja aparatur

5. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

Anwar Prabu Mangkunegara, 2000, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Perusahaan, Cetakan Ke-2, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.

Denhardt & Denhardt. 2003. *The New Public Service. Serving, Not Steering*. New York. M.E. Sharpe Inc.

Dwiyanto, Agus dkk. 2003. *Teladan dan Pantangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK). UGM. Yogyakarta.

*Corresponding author

E-mail addresses: dlofi3jhn@gmail.com



- Edralin, J. Sl. 1997. *The New Local Governance and Capacity Building: A Strategic Approach*. Regional Development Studies: Vol.3, p. 148-150
- Grindle, M. S.,(editor). 1997. *Getting Good Government: Capcity Building In The Public Sector of Developing Countries*. Boston, MA: Harvard Institue for International Development.
- Gupta, Ranjit. 2003. *Note on Institusional Building*. New Delhi: Oxford and IBH Publishing House.
- Hadari, Namawi H. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Handoko, T. Hani. 1996. *Manajemen Personalial Sumber Daya Manusia*. Jogjakarta: BPFE.
- Irawati, N. (2013). *Hubungan Kualitas Pegawai dengan Efektivitas Organisasi di Biro Humas dan Protokol Sekertariat Dearah Provinsi Kepulauan Riau*. Naskah Publikasi, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang
- Kristiadi, J. B. *Kebijaksanaan Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Masyarakat*. Jakarta.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Milen, Anneli. 2006. *Capacity Building Meningkatkan Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Miles, M.B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Moenir, H.A.S. 1998. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta. Bina Aksara.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mubyarto. 1998. *Pembangunan Pedesaan di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mustopadidjaja. 2003. *Sistem Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Haji Masagung
- Nazir, Moh, D. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Pasolong, Herbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ratminto dan Atik S. 2005. *Manajemen Pelayanan : Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta. Pustaka Belajar.
- Riggs, Fred W. 1994. *Administrasi Pembangunan: Sistem Administrasi dan Birokrasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.



Richard M. Steers, 2015, *Efektivitas Organisasi*, Jakarta: Erlangga.

Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) : Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Bagian Kedua*. Bandung. CV. Mandar Maju.

Siagian, Sondang P. 2008. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bina Aksara.

Sinambela, dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta. Bumi Aksara.

Sugiyanto. 2002. *Lembaga Sosial*. Jogjakarta: Global Pustaka Utama.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Supranto, J. 1997. *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syafei, Inu Kencana. 2011. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tampubolon, Usman. 1997. *Pembangunan Pranata*. Yogyakarta: Fisipol UGM.

Tathagati, Arini. *Step by Step Membuat SOP (Standard Operating Procedure)*. 2015. Efata Publishing.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1988. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.

Wibawa, Samodra. 2005. *Reformasi Administrasi: Bunga Rampai Pemikiran Administrasi Negara/Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Willems, Stephane. 2003. *Institutional Capacity and Climate Actions, Organization for Economic Co-operation and Development*. Paris.

Zauhar, Soesilo. 2007. *Reformasi Administrasi: Konsep, Dimensi, dan Strategi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.